

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan sumber daya lainnya. Hal terpenting dalam LKjIP adalah **pengukuran** dan **evaluasi** serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan LKjIP bertujuan antara lain untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Dalam Bab Pendahuluan ini, akan diuraikan tentang gambaran umum organisasi Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) Provinsi Jawa Tengah, isu-isu strategis serta permasalahan yang sedang dihadapi sebagai berikut :

A. Gambaran Umum Organisasi

DPPAD Provinsi Jawa Tengah merupakan Dinas Daerah yang melaksanakan tugas utama yaitu pengelolaan pendapatan dan aset daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, telah ditetapkan kelembagaan atau struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, penyediaan anggaran serta sumber daya manusia sebagai berikut :

1. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Daerah

Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, membawahkan :
 - 1) Subbagian Program.
 - 2) Subbagian Keuangan.
 - 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- c. Bidang Pajak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pajak, membawahkan :
 - 1) Seksi Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
 - 2) Seksi Pajak Lain-lain.
 - 3) Seksi Pembukuan dan Keberatan Pajak.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

- d. Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain, membawahkan :
 - 1) Seksi Retribusi.
 - 2) Seksi Pendapatan Lain-lain.
 - 3) Seksi Pembukuan dan Keberatan Retribusi dan Pendapatan Lain-lain.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

- e. Bidang Evaluasi dan Pembinaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Evaluasi dan Pembinaan, membawahkan :
- 1) Seksi Evaluasi dan Pembinaan Pendapatan.
 - 2) Seksi Evaluasi dan Pembinaan Aset Daerah.
 - 3) Seksi Evaluasi dan Pembinaan Sumber Daya.
- Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
- f. Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan, membawahkan :
- 1) Seksi Pengembangan Sistem Informasi.
 - 2) Seksi Pengolahan Data Pendapatan dan Aset.
 - 3) Seksi Pengembangan Pelayanan dan Pendapatan.
- Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
- g. Bidang Fasilitasi Pengadaan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Fasilitasi Pengadaan Aset, membawahkan :
- 1) Seksi Perencanaan dan Pengadaan Aset.
 - 2) Seksi Inventarisasi dan Distribusi Aset.
 - 3) Seksi Pembukuan dan Neraca Aset.
- Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
- h. Bidang Pengelolaan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengelolaan Aset, membawahkan :
- 1) Seksi Pemeliharaan dan Pengamanan Aset.
 - 2) Seksi Penggunaan dan Pemanfaatan Aset.
 - 3) Seksi Perubahan Status Hukum.
- Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

- i. UPTD;
Masing-masing UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Terdapat 37 UPTD yaitu Unit Pelayanan Pendapatan Dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) yang tersebar di 35 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.
Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

2. Tugas Pokok Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah mempunyai tugas pokok **"melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang pendapatan dan pengelolaan aset daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan"**.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan dan pengelolaan aset daerah, meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, maupun mempersiapkan, mengolah, menelaah, penyusunan rumusan kebijaksanaan teknis serta program kerja dinas.

- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang pendapatan dan pengelolaan aset daerah.
- c. Pembinaan dan fasilitasi bidang pendapatan dan pengelolaan aset daerah lingkup provinsi dan kabupaten/kota, meliputi segala usaha dan kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja, perbaikan tata laksana, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- d. Pelaksanaan tugas di bidang pajak, retribusi, dan pendapatan lain-lain, pengolahan data dan pengembangan pendapatan, pengadaan dan pengelolaan aset daerah.
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pendapatan dan pengelolaan aset daerah.
- f. Pelaksanaan kesekretariatan dinas, meliputi segala usaha dan kegiatan di bidang tata usaha umum, kepegawaian, perlengkapan, dan keuangan, guna mendukung kinerja dinas.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya, meliputi pemberian pertimbangan teknis kepada Gubernur dalam rangka pelaksanaan tugas pengelolaan aset daerah dan penataan realokasi Pendapatan Daerah kepada Kabupaten/Kota.

3. Jumlah Pegawai

Secara keseluruhan jumlah Sumber Daya Manusia di lingkungan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Daftar Nominatif bulan Desember Tahun 2015 sebanyak 1.052 orang yang terdiri atas 855 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 197 orang bukan Pegawai Negeri Sipil (Non PNS).

4. Jumlah Anggaran Pendapatan Dan Anggaran Belanja

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pada APBD murni tahun anggaran 2015 diberikan tanggungjawab untuk mencapai target Pendapatan Rp.12.045.529.759.000,00 dan diberikan dukungan anggaran belanja Rp.403.101.574.000,00 yang terdiri atas Belanja Tidak Langsung Rp.199.514.859.000,00 dan Belanja Langsung Rp.203.586.715.000,00.

B. Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan karena dampaknya yang signifikan. Beberapa isu strategis terkait dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi DPPAD Provinsi Jawa Tengah antara lain :

1. Isu-isu strategis bidang pengelolaan pendapatan daerah:
 - a. Melemahnya perekonomian global yang berdampak pada penurunan daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor dan kemampuan membayar pajak;
 - b. Pengelolaan pelayanan pendapatan di SAMSAT (*public service*);
 - c. Penggunaan dan pemanfaatan aset daerah dalam mendukung pendapatan asli daerah dari sektor retribusi daerah;
 - d. Dukungan teknologi informasi dalam upaya intensifikasi pengelolaan pendapatan daerah.
2. Isu-isu strategis bidang pengelolaan aset daerah
 - a. Inventarisasi dan pencatatan aset daerah khususnya tanah dan bangunan;
 - b. Pengamanan fisik, pengamanan administrasi dan penanganan sengketa;
 - c. Penggunaan dan pemanfaatan serta penghapusan;
 - d. Penghapusan Aset Daerah.

C. Permasalahan Yang Sedang Dihadapi

Beberapa permasalahan atau kendala yang dihadapi oleh DPPAD Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan pengelolaan pendapatan dan aset daerah antara lain :

1. Permasalahan bidang pengelolaan pendapatan daerah
 - a. Permasalahan regulasi berupa pemberian subsidi bea balik nama kendaraan bermotor kepada angkutan umum barang/orang yang berbadan hukum sesuai Permendagri Nomor 101 Tahun 2014;
 - b. Pertumbuhan ekonomi yang melambat dari prediksi 6% menjadi $\pm 5\%$;
 - c. Kondisi dan lokasi aset Pemerintah Daerah yang kurang kompetitif dibandingkan dengan aset yang dikelola swasta;
 - d. Belum tersedianya Sumber Daya Manusia dengan kompetensi Teknologi Informasi yang memadai.
 - e. Penurunan kemampuan ekonomi masyarakat menyebabkan masih cukup tingginya tunggakan pajak.
2. Permasalahan bidang pengelolaan aset daerah.
 - a. Belum tertibnya administrasi pengelolaan aset daerah;
 - b. Belum optimalnya pengelolaan aset daerah yang antara lain ditunjukkan oleh masih banyaknya aset khususnya tanah yang *idle*.
 - c. Hasil pengelolaan aset daerah belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
 - d. Belum optimalnya manajemen pengelolaan yaitu terkait dengan kualitas sumber daya manusia, sarana prasarana, sistem dan teknologi informasi, mekanisme kerja, motivasi, sikap dan perilaku yang mendukung terwujudnya tata kelola aset yang memadai.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

1. Rencana Strategis

Perencanaan strategis merupakan proses yang sistematis dalam pembuatan keputusan di masa yang akan datang yang penuh risiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang sistematis. Oleh karenanya, perencanaan strategis bukan sekedar seperti perencanaan anggaran belanja modal (*capital budgeting*) atau sekedar rencana kerjangangka menengah 5 tahunan. Perencanaan strategis lebih merupakan wahana bagi para pemimpin instansi dan seluruh staf/anggota dalam menskenariokan dan menentukan masa depan organisasi instansi mereka.

Rencana strategis yang dihasilkan dari proses perencanaan strategis dimaksudkan untuk memberikan arah dan sekaligus menentukan apa yang ingin dihasilkan, apa yang ingin dicapai dan apa yang ingin diubah. Dengan demikian, proses perencanaan strategis yang menghasilkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) akan dapat digunakan dalam mengukur akuntabilitas kinerja sebuah entitas.

Rencana strategis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 s/d 2018 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terdiri atas visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program sebagai berikut :

a. Visi

Visi merupakan suatu kondisi atau keadaan yang akan diwujudkan pada akhir periode perencanaan. Visi Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah :

***“Menjadi Dinas yang Transparan dan Akuntabel
Didukung oleh Pelayanan Prima
Dalam Mewujudkan Optimalisasi Pendapatan dan
Pengelolaan Aset Daerah yang Berdaya Guna”***

b. Misi

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan sembilan misi yaitu :

- 1) Meningkatkan kualitas SDM.
- 2) Mengembangkan implementasi teknologi informasi.
- 3) Meningkatkan tata kerja sesuai dengan sistem dan prosedur.
- 4) Meningkatkan budaya kerja aparatur dalam pelayanan publik.
- 5) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana.
- 6) Mengintensifkan pemungutan pajak daerah.
- 7) Mengintensifkan dan mengekstensifkan pemungutan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain.
- 8) Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan aset daerah.
- 9) Mengoptimalkan pemanfaatan dan pemberdayaan aset daerah.

c. Tujuan

- 1) Mewujudkan SDM yang memiliki kompetensi, profesional, dan produktif dalam melaksanakan pekerjaan.
- 2) Mewujudkan tata kelola administrasi yang cepat, mudah, efisiensi dan efektif.
- 3) Mewujudkan tata kerja sesuai dengan standar operasional prosedur pelayanan dan standar pelayanan publik.
- 4) Mewujudkan pelayanan yang baik, aparatur yang disiplin, beretos kerja tinggi, inovatif dan berprestasi.
- 5) Mewujudkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai untuk penyelenggaraan pelayanan.
- 6) Mewujudkan pendapatan pajak daerah sesuai dengan target yang ditetapkan.
- 7) Mewujudkan pendapatan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain sesuai dengan target yang ditetapkan.
- 8) Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan aset daerah yang efektif dan efisien.
- 9) Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan dan pemberdayaan aset daerah guna memberikan kontribusi pada pendapatan daerah.

d. Sasaran

- 1) Meningkatnya kapasitas dan produktifitas kerja aparatur.
- 2) Tersajinya informasi yang cepat, lengkap dan akurat.
- 3) Terwujudnya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pekerjaan.
- 4) Meningkatnya kepuasan publik.
- 5) Meningkatnya ketepatan, kecepatan dan efisiensi kerja.
- 6) Meningkatnya kapasitas dan kualitas sarana utama dan pendukung. pelayanan sehingga terwujud peningkatan kepuasan pelayanan publik.

- 7) Terwujudnya suasana kerja yang kondusif, meningkatnya produktivitas kerja. dan Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
- 8) Meningkatnya pendapatan asli daerah dari unsur pajak daerah.
- 9) Peningkatan pendapatan daerah dari unsur retribusi dan pendapatan lain-lain.
- 10) Meningkatnya kejelasan atas administrasi dan status aset daerah.
- 11) Meningkatnya pemanfaatan aset daerah.
- 12) Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor pemanfaatan aset

e. Strategi

- 1) Memberikan kesempatan studi lanjut, pendidikan penjejang, kursus, menyelenggarakan bimbingan teknis, rapat teknis, dan studi komparasi.
- 2) Meningkatkan kapasitas perangkat keras dan mengembangkan perangkat lunak sesuai kebutuhan.
- 3) Meningkatkan komitmen seluruh level manajemen dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) dan SPP (Standar Pelayanan Publik).
- 4) Melaksanakan ketentuan pelaksanaan tugas secara konsisten dan memberikan *rewards and punishment*.
- 5) Merehabilitasi dan atau membangun gedung baru, serta menyediakan sarana pendukung yang memadai.
- 6) Meningkatkan pelaksanaan ketentuan pemungutan pajak daerah secara konsisten.
- 7) Meningkatkan pelaksanaan ketentuan pemungutan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain secara konsisten.

- 8) Mengadministrasikan aset daerah sesuai ketentuan yang berlaku secara profesional berbasis teknologi.
- 9) Memasarkan aset daerah yang lebih efektif dan efisien

f. Kebijakan

Selaras dengan permasalahan yang dihadapi serta isue strategis yang berkembang, maka ditempuh kebijakan :

- 1) Peningkatan kualitas kompetensi, profesional, dan produktifitas SDM dengan:
 - a) Menugaskan pegawai tugas belajar atau pendidikan penjenjangan.
 - b) Memberikan ijin pegawai melanjutkan pendidikan lanjutan, atau kursus.
 - c) Menyenggarakan bimbingan teknis sesuai kebutuhan sekretariat dan bidang-bidang.
 - d) Menyenggarakan rapat teknis sesuai kebutuhan sekretariat dan bidang-bidang.
 - e) Melaksanakan studi komparasi.
- 2) Pengembangan implementasi teknologi informasi dengan:
 - a) Meremajakan perangkat keras.
 - b) Mengadakan perangkat keras sesuai dengan kebutuhan.
 - c) Menyempurnakan program/perangkat lunak/modul yang telah diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan.
 - d) Membuat program/perangkat lunak/modul baru dan mengimplementasikan sesuai dengan kebutuhan.
 - e) Mengembangkan penyajian data dan informasi berbasis teknologi informasi.
- 3) Peningkatan tata kerja sesuai dengan sistem dan prosedur dengan:

- a) Mengevaluasi dan menyempurnakan SOP dan SPP yang telah dibuat.
 - b) Menyusun SOP dan SPP untuk pekerjaan yang belum dibuatkan SOP.
 - c) Menerapkan SOP dan SPP.
 - d) Mengimplementasikan Standar ISO di Kantor Samsat secara bertahap.
 - e) Melakukan *surveillance* pada Unit-Unit kerja yang telah ber-ISO.
 - f) Melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan pelayanan sesuai ketentuan.
- 4) Peningkatan budaya kerja aparatur dalam pelayanan publik dengan:
- a) Menyediakan sarana dan prasarana kerja yang memadai sesuai kebutuhan.
 - b) Menyelenggarakan kegiatan yang memupuk kedisiplinan, inovasi, prestasi, dan hubungan harmonis antar personal.
 - c) Meningkatkan pembinaan personal secara berkelanjutan.
- 5) Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dengan:
- a) Membuat perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana.
 - b) Merehabilitasi gedung Kantor, rumah dinas UP3AD/Samsat yang sudah kurang sesuai dengan kebutuhan.
 - c) Membangun gedung baru untuk Kantor UP3AD/Samsat yang sudah tidak memungkinkan untuk direhabilitasi guna memenuhi kebutuhan dan perkembangan.

- d) Mengadakan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan.
 - e) Memelihara sarana dan prasarana yang telah ada.
- 6) Intensifikasi pemungutan pajak daerah dengan:
- a) Melakukan pemetaan potensi pajak daerah.
 - b) Meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
 - c) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan dan penagihan pajak daerah.
 - d) Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait .
- 7) Intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain dengan:
- a) Melakukan pemetaan potensi retribusi.
 - b) Meningkatkan kepatuhan pembayar retribusi.
 - c) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan dan penagihan retribusi daerah.
 - d) Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan SKPD penghasil retribusi dan pendapatan lain-lain.
 - e) Menyesuaikan tarif retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - f) Menyempurnakan sistem pelaporan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain.
- 8) Peningkatan tertib administrasi pengelolaan aset daerah dengan:
- a) Melakukan pendataan/inventarisasi aset daerah.
 - b) Melakukan pengamanan aset daerah.
 - c) Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan SKPD pengguna dan instansi terkait.
 - d) Menyelesaikan permasalahan aset daerah.
 - e) Menyempurnakan sistem pelaporan aset daerah.

- f) Meningkatkan peran UP3AD dalam pengelolaan aset daerah.
- 9) Optimalisasi pemanfaatan dan pemberdayaan aset daerah dengan:
 - a) Melakukan administrasi pendataan/inventarisasi aset daerah.
 - b) Melaksanakan penghapusan aset daerah.
 - c) Melakukan perbaikan aset daerah yang dipandang perlu.
 - d) Mempromosikan aset daerah melalui media cetak dan elektronik.
 - e) Mempercepat proses administrasi dengan pihak ketiga.
- g. Program

Dalam rangka pelaksanaan operasional dinas selama kurun waktu 2013 – 2018, maka perlu disusun rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan indikator kinerja. Secara umum Rencana Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

- 1) Program Umum (Program Yang Mendukung Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi) :
 - a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
 - b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
 - c) Program Peningkatan Disiplin Apatur;
 - d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
 - e) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum.
- 2) Program yang Terkait Dengan Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi
 - a) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b) Program Pengelolaan Aset Daerah.

2. Indikator Kinerja Utama

Nama SKPD : Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Jawa Tengah

Urusan : Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah pemerintah yang dilaksanakan

Tugas pokok : Melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang pendapatan dan pengelolaan aset daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tujuan Dan Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Penjelasan
(1)	(2)	(3)
1. Mewujudkan pendapatan pajak daerah sesuai dengan target yang ditetapkan		
a. Meningkatnya Pendapatan asli daerah dari unsur pajak daerah	Jumlah Peningkatan Pendapatan dari sektor Pajak	<p>a. <u>Alasan Pemilihan Indikator</u> Untuk melihat seberapa besar peningkatan PA D dari sektor pajak per/tahunnya</p> <p>b. <u>Formulasi Pengukuran Realisasi</u> pendapatan dari sektor pajak tahun berjalan- realisasi pendapatan dari sektor pajak tahun sebelumnya</p> <p>c. <u>Tipe Penghitungan</u> : Komulatif</p>

Tujuan Dan Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Penjelasan
(1)	(2)	(3)
		d. <u>Sumber Data</u> Hasil monitoring dan evaluasi
2. Mewujudkan pendapatan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain sesuai dengan target yang ditetapkan		
a. Peningkatan pendapatan daerah dari unsur retribusi dan pendapatan lain-lain	Jumlah Peningkatan Pendapatan dari sektor retribusi dan pendapatan lain-lain	<p>a. <u>Alasan Pemilihan Indikator</u> Untuk melihat sebesar peningkatan Pendapatan Alokasi Daerah Provinsi Jawa Tengah dari retribusi dan pendapatan lainnya per/tahunnya</p> <p>b. <u>Formulasi Pengukuran Realisasi</u> Pendapatan dari sektor retribusi tahun berjalan- Realisasi Pendapatan dari sektor retribusi tahun sebelumnya</p> <p>c. <u>Tipe Penghitungan</u> Kumulatif</p> <p>d. <u>Sumber Data</u> Hasil monitoring dan evaluasi.</p>
3. Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan aset daerah yang efektif dan efisien		
a. Meningkatnya pemanfaatan aset daerah.	Jumlah aset milik Pemprov Jateng yang dikerjasamakan/ sewa	a. <u>Alasan Pemilihan Indikator</u> Untuk melihat presentase aset yang dikelola dengan baik

Tujuan Dan Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Penjelasan
(1)	(2)	(3)
		<ul style="list-style-type: none"> b. <u>Formulasi Pengukuran</u> Volume Aset x Tarif c. <u>Tipe Penghitungan</u> Komulatif d. <u>Sumber Data</u> Hasil monitoring dan evaluasi
<ul style="list-style-type: none"> b. Meningkatnya kejelasan atas administrasi dan status aset daerah. 	<p>Jumlah aset yang bersertifikat, proses sertifikat</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. <u>Alasan Pemilihan Indikator</u> Untuk melihat jumlah aset yang bersertifikat dan dalam proses sertifikat, mengingat masih banyak aset pemprov.jateng yang belum terdata. b. <u>Formulasi Pengukuran</u> Jumlah aset yang bersertifikat dan dalam proses sertifikat pada tahun berjalan c. <u>Tipe Penghitungan</u> Komulatif d. <u>Sumber Data</u> Hasil monitoring dan evaluasi

Tujuan Dan Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Penjelasan
(1)	(2)	(3)
4. Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan dan pemberdayaan aset daerah guna memberikan kontribusi pada pendapatan daerah		
Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor pemanfaatan aset.	Jumlah pendapatan dari sektor pengelolaan aset	<p>a. <u>Alasan Pemilihan Indikator</u> Untuk melihat jumlah peningkatan pendapatan dari sektor pengelolaan aset (hasil penjualan aset yg tidak dipisahkan, dikerjasamakan dan disewakan)</p> <p>b. <u>Formulasi Pengukuran Sewa/Pemanfaatan Aset x Biaya sesuai dengan perda</u></p> <p>c. <u>Tipe Penghitungan Kumulatif</u></p> <p>e. <u>Sumber Data</u> Hasil monitoring dan evaluasi</p>

B. Perencanaan Kinerja

Perjanjian Kinerja Tahun 2015

1. Sasaran Strategis

- a. Meningkatkan Pendapatan asli daerah dari unsur pajak daerah.
- b. Peningkatan pendapatan daerah dari unsur retribusi dan pendapatan lain-lain.
- c. Meningkatkan pemanfaatan aset daerah
- d. Meningkatkan kejelasan atas administrasi dan status aset daerah
- e. Meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pemanfaatan aset

2. Indikator Kinerja
 - a. Jumlah Peningkatan Pendapatan dari sektor Pajak
 - b. Jumlah Peningkatan Pendapatan dari sektor retribusi dan pendapatan lain-lain
 - c. Jumlah aset milik Pemprov Jateng yang dikerjasamakan/sewa
 - d. Jumlah aset yang bersertifikat
 - e. Jumlah pendapatan dari sektor pengelolaan aset
3. Target Kinerja
 - a. Peningkatan PAD : 19,53%
 - b. Pengelolaan Aset yang dikelola dengan baik : 85 %

C. Program Dan Kegiatan

Dalam rangka pencapaian Rencana Strategis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018, pada Tahun 2015 telah melakukan upaya optimalisasi pengelolaan pendapatan dan aset dengan melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran sebagai berikut :

Tabel 2.2
Program Kerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset daerah
Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2015

No	Program	Penanggungjawab
A	Program Utama	
1.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Bidang Pajak. 2. Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain. 3. Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan. 4. Bidang Evaluasi dan Pembinaan.

No	Program	Penanggungjawab
A	Program Utama	
2.	Program Pengelolaan Aset Daerah	1. Bidang Fasilitas Pengadaan Aset Daerah. 2. Bidang Pengelolaan Aset Daerah.
B	Program Pendukung	
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Sekretariat
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana	Sekretariat
3.	Peningkatan Disiplin Aparatur	Sekretariat
4.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Sekretariat
5.	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Sekretariat

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan terhadap pencapaian 4 (empat) indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

a. **Sasaran Strategis 1** :Mewujudkan Pendapatan Pajak Daerah Sesuai Dengan Target Yang Ditetapkan.

1) Pengukuran kinerja berdasarkan target dan realisasi tahun berkenaan.

Pendapatan pajak daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 secara keseluruhan ditargetkan sejumlah Rp.10.512.318.175.000,00 yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 terealisasi Rp.9.090.677.397.011,00 atau 86,48%.

Adapun pencapaian target pendapatan pajak daerah selama kurunwaktu 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut :

Tabel 3.1
Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2010 s.d. 2015

No	Tahun Anggaran	Target Perubahan APBD	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	2010	3,076,000,000,000.00	3,893,699,996,503.00	126.58%
2	2011	4,263,000,000,000.00	4,599,046,986,897.00	107.88%
3	2012	5,273,190,000,000.00	5,590,597,156,499.00	106.02%
4	2013	6,018,189,560,000.00	6,716,170,095,198.00	111.60%
5	2014	7,819,097,466,000.00	8,213,117,977,920.00	105.04%
6	2015	10,512,318,175,000.00	9,090,677,397,011.00	86.48%

2) Realisasi Tahun Berjalan Dibandingkan Dengan Realisasi Tahun-tahun Sebelumnya.

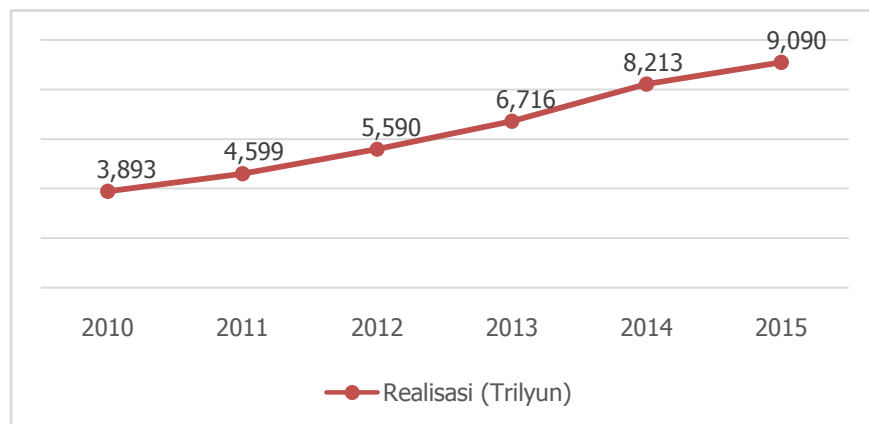
Realisasi pendapatan pajak daerah selama 5 (lima) tahun terakhir senantiasa mengalami **peningkatan**, hal tersebut tersaji dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2
Tabel Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah
Tahun 2010 s.d. 2015

No	Tahun Anggaran	Realisasi	Peningkatan	%
1	2	3	4	5
1	2010	3,893,699,996,503.00	-	-
2	2011	4,599,046,986,897.00	705,346,990,394.00	18.12%
3	2012	5,590,597,156,499.00	991,550,169,602.00	21.56%
4	2013	6,716,170,095,198.00	1,125,572,938,699.00	20.13%
5	2014	8,213,117,977,920.00	1,496,947,882,722.00	22.29%
6	2015	9,090,677,397,011.00	877,559,419,091.00	10.68%

Untuk lebih jelasnya, trend peningkatan pendapatan pajak daerah dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :

Grafik 3.1
Trend Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah
Tahun 2010 s.d. 2015



3) Realisasi Tahun Berjalan Dibandingkan Dengan Realisasi Tahun Berjalan Pada Instansi Sejenis.

Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif terkait dengan capaian kinerja pendapatan pajak tahun berjalan, berikut disajikan Kinerja pendapatan pajak daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dibandingkan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur pada tahun 2015 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.3
Target Dan Realisasi Pajak Daerah
Antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat
Dan Jawa Timur
Tahun anggaran 2015

No	Provinsi	Target	Realisasi	%
1	2	3	5	6
1	Jawa Barat			
	Target APBD Murni	14.942.465.917.000		
	Target Perubahan APBD	14.276.480.327.000	14.616.778.709.013	102,39
	Bertambah (Berkurang)	(665.985.590.000)	340.298.382.013	2,39
2	Jawa Tengah			
	Target APBD Murni	10.266.079.853.000		
	Target Perubahan APBD	10.512.318.175.000	9,090,677,397,011	86,48
	Bertambah (Berkurang)	246.238.322.000	(1.421.640.777.989)	(13,52)
3	Jawa Timur			
	Target APBD Murni	12.591.000.000.000		
	Target Perubahan APBD	12.329.300.000.000	12.497.151.899.551	101,36
	Bertambah (Berkurang)	(261.700.000.000)	167.851.889.551	1,36

Dari tabel tersebut dapat menggambarkan bahwa pada Perubahan APBD, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Timur menurunkan target pendapatan pajak masing masing sebesar Rp.665.985.590.000,00 dan Rp.261.700.000.000,00 penurunan target tersebut dilatar belakangi oleh kondisi perekonomian yang cenderung

mengalami perlambatan dan menurunnya daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor baru.

Sementara itu, target pendapatan pajak daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah justru mengalami kenaikan sejumlah Rp.246.238.322.000 sehingga realisasi pendapatan Pajak Daerah mencapai 86,48% dari target pada Perubahan APBD.

4) Realisasi Tahun Berjalan Dibandingkan Dengan Realisasi/Capaian Kinerja Nasional.

Realisasi Pendapatan Daerah per 31 Desember 2015 berdasarkan laporan sementara (*unaudited*) sejumlah Rp.16.828.230.586.833,00 atau **92,35%** dari target Perubahan APBD sejumlah Rp.18.222.726.402.000,00 Realisasi Pendapatan Daerah tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah Rp.10.904.882.039.880,00; Dana Perimbangan Rp.2.257.142.994.740,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp.3.666.205.552.213,00.

Sementara itu, realisasi pendapatan negara sebagaimana *release* Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro pada tanggal 28 Januari 2016 melalui *website* Kementerian Keuangan <http://www.kemenkeu.go.id/en/node/48703> menyatakan bahwa realisasi pendapatan negara sampai dengan 31 Desember 2015 mencapai Rp.1.504,5 triliun atau **85,4%** dari target APBN-P tahun 2015 yaitu sebesar Rp1.761,6 triliun.

Realisasi pendapatan negara tersebut berasal dari pertama, penerimaan perpajakan, yang meliputi penerimaan dari pajak dan bea cukai sebesar Rp1.240,4 triliun atau 83,3% dari target APBN-P 2015 dan kedua, Penerimaan

Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp253,7 triliun atau sekitar 94,3% dari target APBN-P 2015. Selain itu, realisasi penerimaan hibah tercatat mencapai 304% dari target APBN-P 2015 yang sebesar Rp3,3 triliun.

Berbagai upaya untuk mencapai target pendapatan Pajak Daerah telah dilakukan antara lain :

- Menambah akses layanan Pajak Daerah di luar SAMSAT Induk meliputi :
 - Membuka Samsat Paten di 10 lokasi di Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara; Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri; Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen; Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes; Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo; Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga; Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas; Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora; Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan; dan Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang.
 - Menambah 6 unit armada SAMSAT Keliling yang ditempatkan di UP3AD Kabupaten Brebes, UP3AD Kabupaten Pemalang, UP3AD Kabupaten Semarang, UP3AD Kabupaten Boyolali, UP3AD Kabupaten Banjarnegara dan UP3AD Kota Semarang III.
- Meningkatkan mutu dan tata kelola layanan Pajak Daerah meliputi :
 - Audit Sertifikasi ISO 9001:2008 di SAMSAT Kabupaten Sukoharjo dan SAMSAT Kabupaten Wonosobo serta resertifikasi ISO9001:2008 di SAMSAT Kota Semarang I.

- Bekerjasama dengan Bank Jateng dan Bank BRI dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (perpanjangan Pajak Kendaraan 1 Tahunan).
- Penghapusan Sanksi Administrasi / Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.
- Mempermudah pengurusan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (perpanjangan Pajak Kendaraan 1 Tahunan) tanpa menggunakan BPKB dan atau tanpa melalui pengisian SPOPD. Hal ini didukung dengan otomatisasi sistem sehingga dapat mengurangi antrian dan mempercepat proses pelayanan pembayaran pajak.
- Memisahkan antrian Wajib Pajak pada pengurusan pembayaran pajak 1 tahunan dengan pembayaran pajak 5 tahunan.

b. **Sasaran Strategis 2** :MewujudkanPendapatan Retribusi Daerah Sesuai Dengan Target Yang Ditetapkan.

1) Pengukuran kinerja berdasarkan target dan realisasi tahun berkenaan.

Pendapatan retribusi daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 secara keseluruhan ditargetkan sejumlah Rp.92.911.445.000,00 yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 dapat terealisasi Rp.95,871,359,549 atau 103,19%.

Adapun pencapaian target pendapatan retribusi daerah selama kurunwaktu 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut :

Tabel 3.4
Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2011 s.d. 2015

No	Tahun Anggaran	Target Perubahan APBD	Realisasi	%
1	2	3	4	5
2	2011	60,626,577,000.00	64,549,242,508.00	106.47%
3	2012	68,092,071,000.00	68,250,252,455.00	100.23%
4	2013	74,296,390,000.00	69,970,595,550.00	94.18%
5	2014	78,489,524,000.00	79,475,022,663.00	101.26%
6	2015	92,911,445,000.00	95,871,359,549.00	103.19%

2) Realisasi Tahun Berjalan Dibandingkan Dengan Realisasi Tahun Tahun Sebelumnya.

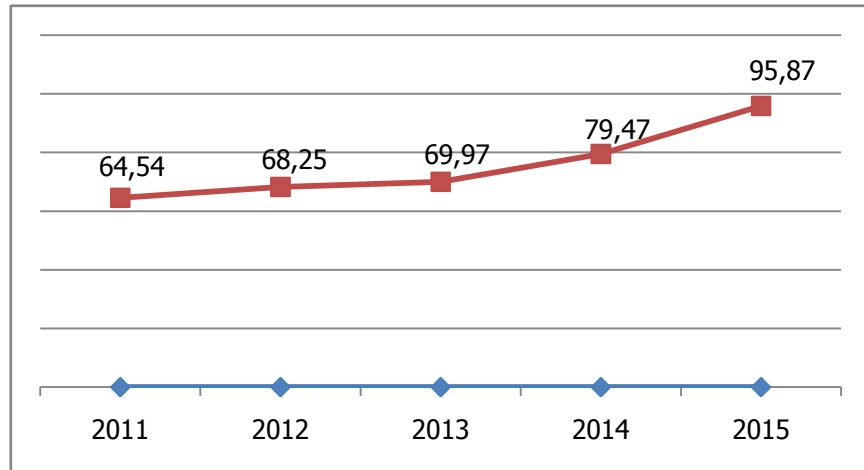
Realisasi pendapatan retribusi daerah selama 5 (lima) tahun terakhir senantiasa mengalami **peningkatan**, hal tersebut tersaji dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.5
Tabel Peningkatan Pendapatan Retribusi Daerah
Tahun 2011 s.d. 2015

No	Tahun Anggaran	Realisasi	Peningkatan	%
1	2	3	4	5
2	2011	64,549,242,508.00		
3	2012	68,250,252,455.00	3,701,009,947.00	5.73
4	2013	69,970,595,550.00	1,720,343,095.00	2.52
5	2014	79,475,022,663.00	9,504,427,113.00	13.58
6	2015	95,871,359,549.00	16,396,336,886.00	20.63

Untuk lebih jelasnya, trend peningkatan pendapatan pajak daerah dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :

Grafik 3.2
Trend Peningkatan Pendapatan Retribusi Daerah
Tahun 2010 s.d. 2015



* Dalam milyar rupiah

3) Realisasi Tahun Berjalan Dibandingkan Dengan Realisasi Tahun Berjalan Pada Provinsi lain.

Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif terkait dengan capaian kinerja pendapatan retribusi tahun berjalan, berikut disajikan kinerja pendapatan retribusi daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dibandingkan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur pada tahun 2015 sebagaimana tabel sebagai berikut :

Tabel 3.6
Perbandingan Target Dan Realisasi Retribusi Daerah
Antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat
Dan Jawa Timur
Tahun anggaran 2015

No	Provinsi	Target	Realisasi	%
1	2	3	5	6
1	Jawa Barat			
	Target APBD Murni	62.037.466.984		

	Target Perubahan APBD	59.015.099.855	73.087.639.624	123,85
	Bertambah (Berkurang)	3.022.367.129	14.072.539.769	23,85
2	Jawa Tengah			
	Target APBD Murni	84.022.367.000		
	Target Perubahan APBD	92.911.445.000	95.867.489.549	103,18
	Bertambah (Berkurang)	8.889.078.000	2.956.044.549	3,18
3	Jawa Timur			
	Target APBD Murni	136.337.487.000		
	Target Perubahan APBD	152.222.599.700	176.560.147.695	115,99
	Bertambah (Berkurang)	15.885.112.700	24.337.547.995	15,99

Pengukuran kinerja peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2015 mencapai 9,97% dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yaitu sebesar 19,53%. Meskipun tidak mencapai target, namun realisasi Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sebagaimana tertuang dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.7
Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2010 s.d. 2015

Tahun	Realisasi PAD	Peningkatan PAD	% Peningkatan
1	2	3	4
2010	4.785.133.227.424,00		
2011	5.564.233.151.730,00	779.099.924.306,00	16,28%
2012	6.629.308.010.656,00	1.065.074.858.926,00	19,14%
2013	8.212.800.640.888,00	1.583.492.630.232,00	23,89%
2014	9.916.358.231.432,00	1.703.557.590.544,00	20,74%
2015	10.904.882.039.880,00	988.523.808.448,00	9,97%

c. **Sasaran Strategis 3** :Mewujudkan Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Daerah Yang Efektif Dan Efisien.

Tertib administrasi pengelolaan aset daerah yang efektif dan efisien difokuskan pada upaya pengamanan fisik dan

administrasi serta optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan aset melalui kerjasama maupun sewa. Pengamanan fisik berupa pemagaran di 7 lokasi yang berada di Kabupaten Karanganyar, Pati 2 lokasi, Demak, Grobogan, dan Batang 2 lokasi; pemasangan 1.480 patok batas tanah; pemasangan 101 label kepemilikan lahan.

Pengamanan administrasi dilakukan dengan persertifikatan 115 bidang tanah sedangkan Pemberdayaan, pengelolaan dan tertib administrasi Barang Milik Daerah; Neraca aset yang akurat, valid dan akuntabel; Dokumen Kebutuhan Barang serta Dokumen Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah. Adapun daftar aset yang disewakan dan dikerjasamakan pada tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 3.8
Daftar Aset Yang Disewakan
Pada Tahun 2015

No	Lokasi/Alamat	Besaran Sewa	Penyewa	KETERANGAN
				JANGKA WAKTU
1	2	5	6	7
1	Jln. Pemuda No. 19 B Kab. Pemalang; Luas Tanah 1.535 M2	15.000.000	Rumah makan "Sambel Layah" Kab. Pemalang	9/9/2015 - 6/6/2020 (5 Tahun)
2	Desa Wonowoso ,Kec. Karang Tengah	3.074.900	Sdr. Ahmadi	Selama 5 Tahun
3	Jl. Poncowolo Barat V NO. 650.B, Semarang; Luas Tanah 180 M2, Luas Bangunan 180 M2	700.000	Sdr. Sadah	Selama 3 Tahun
4	Ds. Suruh, Kecamatan Suruh Kab. Semarang; Luas Tanah 1.315 M2, Luas Bangunan 50 M2	1.350.000	Sdr. Suyadi	Selama 2 Tahun
5	Jln. Pemuda No. 230 Kab. Klaten; Luas Tanah 1.174 M2, Luas	10.600.000	BKK. Klaten	Selama 2 Tahun

No	Lokasi/Alamat	Besaran Sewa	Penyewa	KETERANGAN
				JANGKA WAKTU
1	2	5	6	7
	Bangunan 300 M2			
6	Jln. Raya Weleri – Batang Ds. Tulis, Kab. Batang; Luas Tanah 156 M2	250.000	Sdr. Nuryati	Selama 5 Tahun
7	Jln. Sindoro Kab. Wonosobo; Luas Tanah 1.000M2, Luas Bangunan 500 M2	900.000	CV. Puspa Dieng Kab. Banyumas	Selama 5 Tahun
8	Jln. Kartini No. 108 Kota Salatiga; Luas Tanah 120 M2, Luas Bangunan 100 M2	4.200.000	Sdr. Agus Suprianta	Selama 5 Tahun
9	Jln. Tanjung No. 11 Kota Semarang; Luas Tanah 1.091 M2, Luas Bangunan 543 M2	38.500.000	PMI Cabang Jawa Tengah	Selama 1 Tahun
10	Jln. Reksodipuro Timur No. 31 Kab. Blora; Luas Tanah 80 M2, Luas Bangunan 54 M2	2.400.000	Sdr. Januar Mukti Raharjo	Selama 1 Tahun
11	Jln. Kartini No. 17 Kota Salatiga; Luas Tanah 316 M2, Luas Bangunan 90 M2	10.000.000	Sdr. Harrie Siswanto	Selama 2 Tahun
12	Ds. Kejawar, Kec. Banyumas Kab. Banyumas; Luas Tanah 15.000 M2	7.500.000	Pondok Pesantren Pendidikan Islam Miftahul salam Kab. Banyumas	Selama 2 Tahun
13	Ds. Pagilarang Kec. Kemrajen Kab. Banyumas; Luas Tanah 5.643 M2	3.500.000	Sdr. Mohamad Kusen	Selama 2 Tahun
14	Ds. Pagelaran, Kec. Kemrajen Kab. Banyumas; Luas Tanah 2.800 M2	1.750.000	Sdr. Sarno, Ms	Selama 2 Tahun

Tabel 3.9
Daftar Aset Yang Dikerjasamakan

No	Lokasi/Alamat	Besaran Sewa	Penyewa	KETERANGAN
				JANGKA WAKTU
1	2	5	6	7
1	Jln. Pemuda No. 19 B Kab. Pemasang; Luas Tanah 1.535 M2	15.000.000	Rumah makan "Sambel"	9/9/2015 - 6/6/2020 (5 Tahun)

No	Lokasi/Alamat	Besaran Sewa	Penyewa	KETERANGAN
				JANGKA WAKTU
1	2	5	6	7
			Layah" Kab. Pemalang	
2	Komplek Gor Jatidiri Karangrejo Semarang	484.000.000	PT. Merdeka Suryatama	Kontrak; Tgl. 1 Maret 2011 No.117/2011 No. 012/MSCONT/III/ 2011 Selama 5 Tahun
3	Jl. Imam Bonjol 154-160 Semarang (Gedung JDC)	345.000.000	PT. Sindoro Satriamas	Kontrak; Tgl. 8 Juli 2010 No. 019.6/13757 No. 001/VII/DPJDC/ 2010 Selama 5 Tahun
4	Jl. Raya Kalierang Kab. Brebes	52.864.800	Pemerintah Kab. Brebes (Pasar Kalierang)	Kontrak; Tgl. 2 Mei 2012 No. 031/4735/2012 No. 511.3/2095/ 2012 Selama 5 Tahun
5	Jl. Tentara Pelajar No. 7 Kota Magelang	58.560.000	Skylight Plaza	Pengembalian aset dari Dinas PSDA Prov. Jateng Th 2013. Selama 25 Tahun

- d. **Sasaran Strategis 4** :Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan dan pemberdayaan aset daerah guna memberikan kontribusi pada pendapatan daerah.

Optimalisasi pemanfaatan dan pemberdayaan aset daerah telah memberikan kontribusi atas peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor selain pajak yang antara lain berupa Retribusi Jasa Umum yang pada tahun 2011 realisasinya mencapai Rp.18.013.849.034,00 meningkat menjadi Rp24.479.896.520,00 pada akhir tahun 2015 sedangkan penerimaan Retribusi Jasa Usaha yang pada tahun 2011 baru terealisasi Rp.45.069.644.050,00 meningkat menjadi Rp.65.254.627.544,00 pada akhir tahun 2015.

2. Evaluasi Kinerja

a. Analisis Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.

1) Peningkatan pendapatan asli daerah

a) Faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target peningkatan PAD antara lain :

- Obyek pajak baru turun sebanyak 113.203 unit kendaraan bermotor dibandingkan tahun 2014;
- Adanya kebijakan mobil murah [LCGC] berdampak pada rendahnya nilai BBNKB per unit kendaraan;
- Adanya kebijakan Subsidi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor bagi angkutan umum orang sebesar 70% dan barang sebesar 50% yang diatur dalam Permendagri Nomor 101 Tahun 2014 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB;
- Adanya penurunan nilai jual Bahan Bakar Kendaraan.

b) Faktor yang mendukung kinerja dalam rangka peningkatan PAD antara lain :

- Adanya kesempatan untuk melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota sampai dengan tingkat Desa/Kelurahan, Kepolisian, Tim Penggerak PKK dan KNPI dalam hal sosialisasi tentang pajak daerah serta upaya penanganan piutang Pajak Kendaraan Bermotor.
- Adanya peluang kerjasama pemanfaatan/sewa kekayaan daerah dengan pihak ketiga/masyarakat.

2) Pengelolaan Aset Daerah.

a. Faktor penghambat pelaksanaan program/kegiatan terkait dengan pengelolaan aset yang baik antara lain :

- Lingkup akuntansi aset yang luas sehingga memerlukan sumber daya yang memadai baik SDM, dana dan peralatan.
- Kelemahan dalam hal bukti kepemilikan/penguasaan khususnya aset tanah sehingga berpotensi menimbulkan sengketa hukum.
- Lokasi dan kondisi aset yang kurang kompetitif apabila dibandingkan dengan aset sejenis milik swasta sehingga kurang menarik minat masyarakat dalam pemanfaatan aset daerah.
- Kurangnya komitmen Kepala SKPD selaku Pengguna Barang dalam hal tertib administrasi dan penggunaan serta pemanfaatan aset yang dikuasai oleh SKPD.

b. Faktor yang mendukung pelaksanaan program/kegiatan terkait dengan pengelolaan aset yang baik antara lain :

- Tersedianya sistem informasi pengelolaan aset daerah (SIMASET);
- Adanya reformasi birokrasi dibidang pelayanan publik dilingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang sehingga proses persertifikatan tanah sebagai bukti kepemilikan menjadi lebih mudah dan cepat.

b. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Secara garis besar dalam hal fisik pemanfaatan sumber daya telah terlaksana 100% akan tetapi ada efisiensi Program Administrasi Pelayanan Perkantoran pada kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.

Tabel 3.10
Daftar Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik	Efisiensi
1	2	3	4	5	6
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		74.241.978.000	85,79	100	14,13
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.051.688.000	82,04	100	17,96
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.816.585.000	79,27	100	20,73
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	1.273.991.000	82,17	100	17,83
4	Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah	650.000.000	88,09	100	11,91
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor / Rumdin	1.624.665.000	91,83	100	8,17
6	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	7.364.282.000	95,67	100	4,33
7	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.078.540.000	81,74	100	18,26
8	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	1.391.845.000	86,22	100	13,78
9	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	192.655.000	62,88	99	36,09
10	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Praturan	373.027.000	95,37	100	4,63
11	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	3.870.572.000	85,10	100	14,90
12	Kegiatan Rapat Koord dan Konsuldi Dlm dan Luar Daerah (Perdin)	9.682.673.000	86,90	100	13,10
13	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	16.871.455.000	89,90	100	10,10
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA		78.055.475.000	91,90	100	8,10
1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	1.234.000.000	94,62	100	5,38
2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	25.760.866.000	89,32	100	10,68

No	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik	Efisiensi
1	2	3	4	5	6
3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan / Dinas Operasional	7.078.038.000	77,83	100	22,17
4	Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung kantor	1.314.025.000	93,47	100	6,53
5	Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	9.932.464.000	88,09	100	11,91
6	Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair	870.151.000	94,37	100	5,63
7	Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor dan R.Tangga	4.859.329.000	93,99	100	6,01
8	Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Buku buku Perpustakaan	25.000.000	86,61	100	13,39
9	Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Arsip	175.000.000	51,61	100	48,39
10	Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Pertanian Tanaman dan Taman	1.426.254.000	95,70	100	4,30
11	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	25.380.348.000	99,32	100	0,68
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR		695.000.000	89,56	100	10,44
	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas	695.000.000	89,56	100	10,44
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SDM		1.434.839.000	67,24	100	32,76
1	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	432.754.000	54,67	100	45,33
2	Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	149.287.000	35,10	100	64,90
3	Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	580.587.000	77,37	100	22,63
4	Kegiatan Peningkatan Kapasitas / Kualitas SDM	272.211.000	83,24	100	16,76

- c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.11
Daftar Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

No	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik	Efisiensi
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENYELENGGARN PEMERINTAHAN UMUM		4.792.441.000	81,93	100	18,07
1	Kegiatan Sinkronisasi Program	948.735.000	83,67	100	16,33
2	Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Pendapatan	3.843.706.000	81,50	100	18,50
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		7.832.290.000	72,08	100	27,92
1	Kegiatan Pengendalian Pajak Daerah / Intens, Ekstens, Sertifikasi	1.984.797.000	55,05	100	44,95
2	Kegiatan Pengendalian Pungutan Retribusi dan PLL	1.621.670.000	73,49	100	26,51
3	Kegiatan Evaluasi dan Pembinaan	1.582.339.000	72,00	100	28,00
4	Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Pelayanan Wajib Pajak	1.500.000.000	91,65	100	8,35
5	Kegiatan Pengolahan Data Pendapatan Aset	497.003.000	71,34	100	28,66
6	Kegiatan Pengembangan Pelayanan Pendapatan	646.481.000	76,16	100	23,84
7	PROGRAM PENGELOLAAN ASET DAERAH	7.287.317.000	70,56	100	29,44
1	Kegiatan Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Daerah	1.160.537.000	75,17	100	24,83
2	Kegiatan Up Dating Data Pengadaan dan Mutasi	238.150.000	98,18	100	1,82

No	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik	Efisiensi
1	2	3	4	5	6
3	Kegiatan Pengamanan Aset Daerah	3.135.538.000	71,91	100	28,09
4	Kegiatan Penghapusan dan Pemindahtanganan BMD Provinsi Jateng	911.838.000	70,81	100	29,19
5	Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah	1.126.103.000	54,66	100	45,34
6	Kegiatan Penyelesaian kasus/sengketa aset	101.834.000	92,19	100	7,81
7	Kegiatan Pengendalian, Pembinaan dan Pengawasan BMD	452.650.000	67,60	100	32,40
8	Kegiatan Penyusunan DKBMD dan DKPBMD	160.667.000	74,90	100	25,10

B. Realisasi Anggaran

Anggaran pendapatan yang dikelola oleh DPPAD sejumlah Rp.8.930.680.662.000 yang terdiri dari Pajak Daerah Rp.8.921.006.846.000; Retribusi Daerah Rp.9.202.681.000 serta Lain- lain PAD yang Sah Rp. 471.135.000. Secara keseluruhan, realisasi pendapatan DPPAD Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2015 mencapai Rp. 7.594.546.860.101 (85,04%) yang terdiri atas realisasi pendapatan Pajak Daerah Rp. 7.515.078.178.624,- (84,24 %); Retribusi Daerah Rp. 9.895.334.776,- (107,53 %) serta Lain-lain PAD Yang Sah Rp. 69.573.346.701,-(14767,18 %)

Anggaran belanja yang dikelola oleh DPPAD sejumlah Rp.403.101.574.000,- yang terdiri atas belanja tidak langsung Rp.199.514.859.000,- dan belanja langsung Rp.203.586.715.000,- Realisasi anggaran belanja tidak langsung Rp. 173.932.708.630,- (87,30%) sedangkan realisasi anggaran belanja langsung Rp. 151.732.016.154 (87,03 %). Realisasi fisik secara keseluruhan mencapai 99,9% karena ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dan beberapa kegiatan tidak selesai dilaksanakan yaitu Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 disusun guna memenuhi salah satu prinsip governance yaitu transparansi dan akuntabilitas. Gambaran mengenai keberhasilan beserta faktor pendukungnya dan kegagalan beserta faktor penghambatnya baik dari sisi internal yang *controlable* maupun sisi eksternal yang *uncontrolable* dapat dijadikan feedback bagi upaya perbaikan dimasa yang akan datang.

Hasil pengukuran kinerja kegiatan dan kinerja sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Hasil pengukuran kinerja kegiatan secara fisik mencapai 99,9% dan serapan anggaran belanja langsung mencapai (87,03 %).
2. Hasil pengukuran kinerja sasaran yang terdiri dari dua indikator sasaran sebagai berikut :
 - a. Pengukuran kinerja atas indikator sasaran peningkatan PAD menunjukkan bahwa peningkatan PAD pada tahun 2015 mencapai 9,97% dari target 19,53% dengan capaian kinerja 51,05% yang disebabkan antara lain adanya perlambatan ekonomi, kebijakan LCGC, penurunan jumlah kendaraan baru sebanyak 113.203 unit apabila dibandingkan dengan tahun 2014 serta adanya kebijakan subsidi Bea Balik Nama bagi kendaraan angkutan umum yang berbadan hukum.
 - b. Hasil Pengukuran kinerja atas indikator sasaran aset dikelola dengan baik pada tahun 2015 mencapai 85% dari target yang ditetapkan sebesar 85% dengan capaian kinerja 100%.

3. Total serapan anggaran mencapai Rp. 325.664.724.784,- atau 80,79% terdiri atas serapan anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 173.932.708.630,- atau 87,18% dari Rp. 195.514.859.000,- dan serapan anggaran belanja langsung Rp. 151.732.016.154 atau 74,53% dari Rp. 203.586.715.000,-

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

Sekian dan terimakasih.

Semarang, Februari 2016

KEPALA DINAS PENDAPATAN
DAN PENGELOLAAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

HENDRI SANTOSA, SE, Ak, M.Si, CA

Pembina Utama Madya
NIP. 19611226 198303 1 001